

PENULISAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI UPAYA PEMERINTAH
DALAM REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA SISTEM PERADILAN ANAK**



Diajukan Oleh

Lavenia Olga Mustika Sarisih

NPM : 200513678

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI UPAYA PEMERINTAH
DALAM REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA SISTEM PERADILAN ANAK**



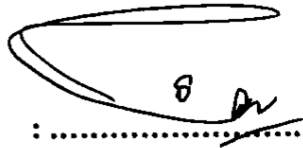
Diajukan Oleh

Lavenia Olga Mustika Sarisih

NPM : 200513678
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Dosen Pembimbing :
Tanggal : 26 Februari 2024

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :


**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI UPAYA PEMERINTAH
DALAM REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA SISTEM PERADILAN ANAK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Maret 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memberikan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual menjadi fokus utama dalam penelitian hukum ini. Kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah diperlukan untuk memastikan masa depan anak korban terjamin. Pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan oleh instansi yang kompeten, seperti lembaga sosial dan aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum mengenai rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menganalisis kebijakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yang memfokuskan pada norma hukum positif terkait upaya rehabilitasi anak korban oleh pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan pada tiap daerah ada yang diatur dalam Peraturan Gubernur yang dalam salah satu kewenangannya dapat menjadi dasar hukum dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak korban. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini untuk menghindari kekosongan hukum. Akademisi, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang memastikan hak rehabilitasi anak korban terjamin, serta menghilangkan stigma yang melekat pada mereka dalam masyarakat.

Kata kunci: Anak Korban, Pemerintah, Upaya Rehabilitasi

ABSTRACT

The importance of government involvement in providing rehabilitation to child victims of sexual violence is the main focus of this legal research. Clear and decisive government policies are needed to ensure the future well-being of these victims. The implementation of these policies should be carried out by competent agencies, such as social institutions and law enforcement authorities. The research problem in this study is how the legal policy regarding the rehabilitation of child victims of sexual violence operates within the juvenile justice system. The aim of this research is to gather the necessary data to analyze this legal policy. The research method used is normative law, which focuses on positive legal norms related to the government's efforts in rehabilitating child victims. Data collection is conducted through literature review and interviews with experts. The results of the research show that in each region there are regulations regulated by the Governor, one of whose authorities is the legal basis for providing rehabilitation efforts to child victims. Therefore, legislation is needed that regulates this matter to avoid a legal vacuum. Academics, legislators, law enforcement officials and the community are expected to play a role in formulating and implementing policies that ensure the rehabilitation rights of child victims are guaranteed, as well as eliminating the stigma attached to them in society.

Keywords: Child Victims, Government, Rehabilitation Efforts

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	13
1. Anak	13
2. Hak Anak	13
3. Korban	13
4. Perlindungan Anak Korban	14
5. Rehabilitasi	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Cara Pengumpulan Data	17
4. Analisis	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Kebijakan Hukum tentang Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hak-Haknya	20
1. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	20
2. Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21

B. Kebijakan Hukum tentang Rehabilitasi Sosial Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	24
1. Konsep dan Urgensi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban.....	24
2. Rehabilitasi Sosial Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	26
3. Rehabilitasi sosial pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	29
C. Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Tengah	31
1. Pengaturan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Tengah.....	31
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Tengah.....	37
3. Kendala dalam Melakukan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Tengah	40
D. Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41
1. Pengaturan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
E. Pengaturan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Masa Mendatang.....	45
BAB III PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

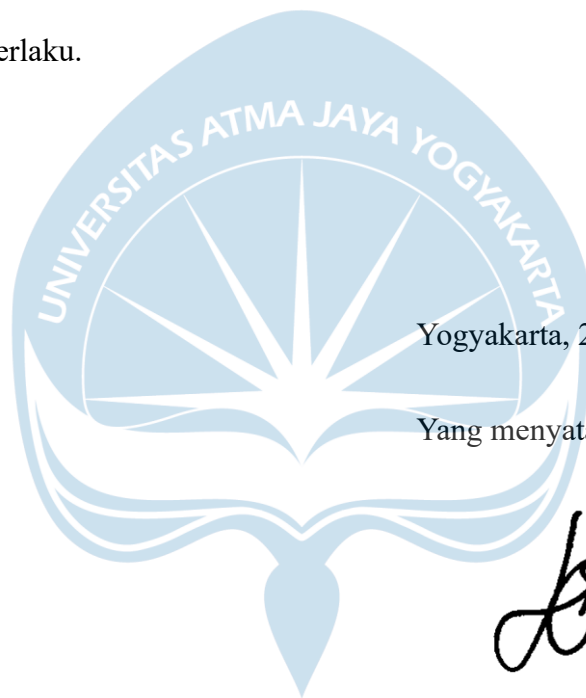
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami DIY	59
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah	60



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "LOMS", is written over the bottom right portion of the university logo.

Lavenia Olga Mustika Sarisih